

CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ESELON II									ESELON III				ESELON IV					
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	No	Program	Indikator Program	No	Kegiatan	Indikator Kegiatan (ouput)	No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (ouput)	Urusan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Sekretariat)			
												2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				
												2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
														4		Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
												3	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu		5	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan
														6		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	
														7		Penyediaan Barang Cetakkan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Penggandaan yang di sediakan	
														8		Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	
														9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	
												4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik		10	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan
														11		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Laninnya yang disediakan	
												5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik		12	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat
														13		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	
														14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	
														15		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	
												6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik		16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak Perizinannya
														17		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi	

ESELON II									ESELON III				ESELON IV				
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	No	Program	Indikator Program	No	Kegiatan	Indikator Kegiatan (ouput)	No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (ouput)	Urusan		
ESELON II									ESELON III				ESELON IV				
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	No	Program	Indikator Program	No	Kegiatan	Indikator Kegiatan (ouput)	No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (ouput)	Urusan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	Meningkatnya laju investasi	Meningkatnya Investasi di Rejang Lebong	2	Meningkatnya Pengembangan Iklim Investasi	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kebutuhan Penanaman Modal	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Penanaman Modal)		
										2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal	2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PERDA Penanaman Modal	
													3	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku dan film peta potensi unggulan daerah		
				Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan promosi penanaman modal		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pameran / even promosi	4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti			
				Meningkatnya Pelayanan dan Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	Persentase pelayanan penanaman modal		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan penanaman modal	4	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terciptanya Pelayanan Prima	5	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Pelayanan Perizinan Dan Perizinan Non Usaha)		
												6	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Informasi		
				Meningkatnya Pelayanan dan Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian dan Pengawasan)		
														8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	
															9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penoawasan

CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ESELON II									ESELON III				ESELON IV		
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	No	Program	Indikator Program	No	Kegiatan	Indikator Kegiatan (ouput)	No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (ouput)	Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
												2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	
									2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
												4	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
									3	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	5	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	
												6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	
												7	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	
												8	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	
												9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	
									4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	10	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	
												11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	
									5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	12	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	
												13	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	
												14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	
												15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	
									6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak Perizinannya	
												17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi	

ESELON II									ESELON III				ESELON IV			
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	No	Program	Indikator Program	No	Kegiatan	Indikator Kegiatan (ouput)	No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (ouput)	Urusan	
ESELON II									ESELON III				ESELON IV			
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	No	Program	Indikator Program	No	Kegiatan	Indikator Kegiatan (ouput)	No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (ouput)	Urusan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Meningkatnya laju investasi	Meningkatnya Investasi di Rejang Lebong	2	Meningkatnya Pengembangan Iklim investasi	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kebutuhan Penanaman Modal	Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
									2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal	2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal		
									3	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku dan film peta potensi unggulan daerah	3	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku dan film peta potensi unggulan daerah		
				Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan promosi penanaman modal		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pameran / even promosi	4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti		
				Meningkatnya Pelayanan dan Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	Persentase pelayanan penanaman modal		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan penanaman modal	4	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terciptanya Pelayanan Prima	5	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan aplikasi OSS		
									6	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non		6	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Meningkatnya Pelayanan dan Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penendali pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		
												8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		
												9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		